



KADIN NEWS

VOL. 10 | MEI 2024



Kadin Indonesia Siapkan Whitepaper Kebijakan Ekonomi untuk Dukung Program Pemerintahan 2024-2029

Penguatan Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia untuk Membangun Fondasi Kuat dalam Penyelesaian Konflik

Tingkatkan Daya Saing Pelaku Usaha, Kadin Indonesia dan LKPP Gelar ICEF 2024

Kadin Indonesia Dorong Sinergi dan Teknologi dalam Pengembangan Transportasi melalui ITS Asia Pacific Forum 2024

Percepat Digitalisasi di Indonesia, Kadin dan Thales Gelar Innovation Day

Daftar Isi

SOROTAN BULANAN

01	Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia	Manfaat Keanggotaan Kadin	43
03	Program Pengurus	Cara Pendaftaran Anggota Kadin	44
16	Program Internal	Fitur Terbaru Website Kadin	45
18	Kegiatan Bersama dengan Kementerian/Lembaga/Asosiasi/Media	Opini: Akses Indonesia ke OECD Membuka Peluang Indonesia untuk Memajukan Iklim Ekonomi dan Investasi Tanah Air	46
24	Kunjungan Internasional	Kabar Terkini: Kebijakan Program Simpanan Wajib Tapera Sebesar 3%	47
27	Penandatanganan Nota Kesepahaman	Inisiatif Kadin Indonesia: Kadin for Naker	51
28	Ayo Berkadin!	Inisiatif Kadin Indonesia: Wiki Wirausaha	52
30	Special Section Peluncuran Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia	Inisiatif Kadin Indonesia: Kadin Net Zero Hub	53
33	Special Section Press Conference Kadin Indonesia Siapkan Usulan Whitepaper Kebijakan Ekonomi	Inisiatif Kadin Indonesia: TRADE	54
35	Special Section Indonesia Catalogue Expo dan Forum 2024		
37	Special Section Intelligent Transport System Asia Pacific Forum 2024		
39	Special Section Innovation day		
41	Special Section Solo Great Sale		

SAMBUTAN KETUA UMUM

Kadin Indonesia



Selaku Ketua Umum Kadin Indonesia, saya merasa bangga dan berterima kasih kepada seluruh anggota serta tim atas kontribusi mereka dalam menyukseskan inisiatif-inisiatif ini, sehingga bersama-sama kita dapat terus berkontribusi positif bagi perekonomian nasional, sekaligus melahirkan generasi baru pengusaha-pengusaha dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya yang senantiasa mengiringi langkah Kadin Indonesia dalam memajukan dunia usaha di negeri ini.

Mewakili Kadin Indonesia, saya merasa bangga dan berterima kasih kepada seluruh anggota serta tim yang telah bekerja keras dalam menjalankan berbagai program dan inisiatif strategis. Pada newsletter edisi kesepuluh ini, izinkan saya menyampaikan beberapa program utama yang sedang kami jalankan, salah satunya adalah penyusunan whitepaper kebijakan ekonomi untuk menyukseskan program kerja pemerintah periode 2024-2029. Melalui whitepaper ini, Kadin berharap dapat berkontribusi dalam penyusunan program pembangunan 5 tahun kedepan. Bapak dan Ibu rekan pengurus dan anggota baik di pusat maupun daerah, serta rekan asosiasi sektoral kami undang untuk dapat memberikan masukan terhadap program pembangunan ekonomi 2024-2029 ini.

Sebagai induk organisasi dunia usaha, Kadin Indonesia juga secara konsisten terus mengupayakan implementasi mandat UU yang diembannya. Salah satunya melalui penguatan Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia dalam rangka penyelesaian sengketa bisnis yang efisien dan efektif melalui pendekatan mediasi, penyelenggaraan Indonesia Catalogue Expo dan Forum (ICEF) 2024 dalam rangka mendukung penggunaan produk dalam negeri, serta mendorong sinergi dan teknologi di bidang transportasi melalui ITS Asia Pacific Forum 2024. Di bulan Mei, Kadin juga mewujudkan dukungan terhadap proses transformasi digital melalui penyelenggaraan kegiatan Innovation Day bersama Thales.

Saya berharap, melalui program-program tersebut, Kadin Indonesia dapat terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, serta membantu menguatkan kapasitas pengusaha nasional dan mendorong terciptanya pengusaha-pengusaha baru dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045.

Akhir kata, mari kita terus bekerja keras dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri dan sejahtera.

Salam,

M. Arsjad Rasjid P. M.

Ketua Umum Kadin Indonesia

Sorotan Kegiatan **Bulan Ini**



MEETING
PENGURUS BIDANG



MEETING DENGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA



AUDIENSI



EVENT



ANGGOTA BARU



ANGGOTA YANG
MEMPERPANJANG KTA



PENANDATANGANAN
NOTA KESEPAHAMAN DAN
PERJANJIAN KERJA SAMA



KUNJUNGAN
INTERNASIONAL

PROGRAM PENGURUS

Kolaborasi Kadin Indonesia dan Bank Syariah Indonesia, Dukung Peningkatan Kapasitas UMKM

Salah satu faktor penting dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meningkatkan kapasitas atau 'naik kelas' adalah melalui ketersediaan pembiayaan sebagai modal usaha. Sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia yang menyerap 97 persen tenaga kerja nasional yang berkontribusi pada 61 persen PDB Nasional, ketersediaan modal yang cukup merupakan faktor yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan bisnis UMKM yang berdaya saing global.



Kadin Indonesia melalui Badan UMKM dan Koperasi mengadakan pertemuan dengan Bank Syariah Indonesia guna membahas potensi pembiayaan kredit mikro bagi para pelaku UMKM dan Koperasi anggota Kadin Indonesia, pada tanggal 3 Mei 2024, di Menara Kadin Indonesia. Tercatat hingga tahun 2023, 85 persen dari anggota Kadin Indonesia merupakan pelaku UMKM.

Selain membahas kolaborasi pembiayaan bagi UMKM, pertemuan dengan BSI juga bertujuan untuk menjajaki potensi pengembangan kapasitas kewirausahaan nasional dalam rangka meningkatkan jumlah wirausaha nasional di Indonesia yang saat ini baru mencapai hingga 3,9 persen dari total penduduk. Kadin Indonesia melalui studi yang dilakukan dalam Peta Jalan Indonesia Emas 2045 melihat bahwa untuk mencapai pertumbuhan sebagai negara maju setidaknya Indonesia memerlukan 10 persen dari total penduduknya menjadi wirausaha nasional.

Perkuat Koordinasi dan Silaturahmi melalui Rapat Kerja dan Halalbihalal Bidang Organisasi



Pengurus Bidang Organisasi mengadakan rapat koordinasi sebagai tindak lanjut terkait program kerja Bidang Organisasi yang sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Pengurus Harian kedua Kadin Indonesia. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi, Yukki Nugrahawan Hanafi bersama Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Eka Sastra, memimpin rapat ini pada 7 Mei 2024, di Menara Kadin Indonesia.

Beberapa pokok bahasan dalam rapat meliputi: penyusunan Peraturan Organisasi (PO) terkait Yayasan, Lembaga, dan Kesekretariatan, pendampingan pelaksanaan kegiatan keorganisasian seperti Rapimprov hingga Muprov. Rapat ini juga membahas, penyusunan Peraturan Organisasi (PO) terkait Yayasan, Lembaga, dan Kesekretariatan, pendampingan pelaksanaan kegiatan keorganisasian seperti Rapimprov hingga Muprov. Pembahasan ini menjadi penting sebagai bentuk upaya Kadin Indonesia dalam mewujudkan operasional organisasi yang efisien, transparan, dan berjalan sesuai dengan kerangka aturan bagi setiap anggota.



Agenda khusus mengenai program peningkatan jumlah anggota Kadin melalui kampanye "Ayo BerKadin!" turut dibahas secara intensif. Beberapa strategi diantaranya: peningkatan manfaat dan layanan keanggotaan Kadin, penggunaan kegiatan wajib keorganisasian Kadin untuk mengkampanyekan keanggotaan Kadin, serta sinergi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Masih dalam suasana momen Idul Fitri 1445 H, pertemuan ini ditutup dengan Halalbihalal bersama seluruh Pengurus Bidang Organisasi. Pertemuan ini diharapkan juga menjadi momentum penting dalam memastikan implementasi program kerja sekaligus memperkuat silaturahmi antar para pengurus.

PROGRAM PENGURUS

Gali Peluang dan Tantangan Ekonomi Jangka Panjang Indonesia melalui Pertemuan Kadin Indonesia dan Bank Dunia



Kadin Indonesia menyambut baik studi yang tengah dilakukan oleh Bank Dunia (World Bank) terkait pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia. Studi memfokuskan pada kinerja jangka panjang ekonomi Indonesia ini bertujuan untuk memperkuat reformasi kebijakan dan peraturan yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia.

Guna menyampaikan pandangan dunia atas studi yang dilakukan Bank Dunia ini, Kadin Indonesia yang diwakili oleh Kepala Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan, Tigor Siahaan, melaksanakan pertemuan dalam forum yang bertajuk "Forum on Long-Term Economic Growth and Competitiveness in Indonesia" pada 6 Mei 2024.



Dalam pertemuan ini seluruh pihak yang terlibat fokus membahas kinerja manufaktur dan jasa serta prioritas reformasi struktural, informalitas dan kinerja ekonomi, serta pajak usaha dan kinerja ekonomi.

Sebagai induk organisasi usaha di Indonesia, Kadin Indonesia menekankan pentingnya memberikan masukan atas reformasi kebijakan serta mendorong kontribusi peran sektor swasta terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Studi ini nantinya akan menghasilkan rekomendasi yang dapat pemerintah gunakan sebagai acuan pertimbangan penyusunan kebijakan ekonomi.

PROGRAM PENGURUS

Menjaga Laut, Membangun Ekonomi: Proyek Blue Halo S dan Ekoturisme Berbasis Blue Economy

Blue Halo S merupakan sebuah inisiatif konservasi yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengelola konservasi sumber daya alam kelautan dan perikanan, termasuk di dalamnya lingkaran ekologi dan ekonomi antara produksi dan perlindungan laut. 1-liner potensi data laut kita apa kalo emang di klaim seperti kalimat opening diatas.

Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatra Teuku Zulham, Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Joseph Pangalila, Ketua Komite Tata Ruang dan Wilayah Sumatra Bagian Utara, Ketua Komtap Sumatra Bagian Timur, dan Konservasi Indonesia, mengadakan pertemuan guna membahas kelanjutan dari pendanaan pilot project Blue Halo S yang saat ini sedang dijalankan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 572, yang mencakup pesisir barat Sumatra hingga pada pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatra bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan dalam menyusun daftar inventaris perusahaan atau kadin daerah yang berminat untuk berpartisipasi dalam dengan Proyek Blue Halo S. Selain itu, mereka juga membahas penyusunan model bisnis yang sesuai serta rencana kerjasama dengan Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengembangkan program ecotourism berbasis blue economy.

Proyek Blue Halo S sendiri merupakan upaya untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait, Konservasi Indonesia berharap dapat mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan dalam mengelola sumber daya laut. Selanjutnya, dukungan dari berbagai wilayah dan sektor, diharapkan proyek ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan serta perekonomian di sekitar wilayah pesisir yang terlibat.

KONSEP BLUE ECONOMY

Blue Economy adalah upaya optimalisasi pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya laut secara inklusif dan berkelanjutan, sehingga tetap mengedepankan pelestarian laut serta ekosistem pendukungnya

Sumber: Bappenas, 2024

(lanjutan di halaman 7)



TUJUAN BLUE ECONOMY

Mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelestarian ekosistem laut, serta membuka sebanyak-banyaknya lapangan kerja

Dikaitkan dengan konteks Indonesia, blue economy mencakup keberlanjutan ekosistem kemaritiman, yaitu:



Perikanan
dan Kelautan



Pariwisata
Bahari



Energi
Terbarukan



Transportasi
Maritim



Industri Pengolahan
Hasil Kelautan



Konservasi
Laut

Sektor-sektor ini dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera

POTENSI BLUE ECONOMY INDONESIA

- 01 | **Keanekaragaman spesies terumbu karang** yang mencapai 75% dari total spesies dunia
- 02 | Memiliki **lebih dari 13 spesies lamun** dengan luas 30.000 km²
- 03 | Memiliki **3,31 juta hektar lahan mangrove** yang merupakan 20% dari total mangrove dunia
- 04 | Indonesia adalah **produsen hasil perikanan laut dan tambak** kedua terbesar di dunia
- 05 | **Perikanan dan akuakultur** memberikan kontribusi gabungan sebesar 27 miliar dolar AS pada PDB nasional
- 06 | **Pariwisata bahari** memberikan kontribusi bruto sebesar 26 miliar dolar AS

Sumber: Kemenko Marves, 2024

TANTANGAN BLUE ECONOMY

Tantangan Indonesia, yaitu:

1. **Eksplotasi perikanan** secara berlebihan yang mencapai 38% dari total sumber daya perikanan Indonesia
2. **Kurangnya pendanaan** untuk marine protected area (MPA), di mana saat ini anggaran pemerintah hanya mampu menyelesaikan 4% dari total kebutuhan dana untuk mengelola 12,5 juta hektar lahan MPA.

Sumber: Kemenko Marves, 2024

SOLUSI BLUE ECONOMY

Program sustainable financing Blue Halo S

Program ini telah memasuki tahap pilot project di Wilayah Pengelolaan Perikanan 572 (Wilayah Barat Sumatera)

Telah dibentuk juga Blue Ecosystem Adaptation Mechanism (BEAM) yang bertujuan untuk mendukung mitigasi dan adaptasi melalui skema pendanaan strategis

Inisiatif ini dilakukan dengan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga:

1. Kemenko Marves
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kadin Indonesia
4. Konservasi Indonesia

PROGRAM PENGURUS

Indonesia Golf Friendship dan Halal Bihalal: Merajut Tali Silaturahmi dalam Diplomasi



Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia menyelenggarakan acara Indonesia Golf Friendship dan Halalbihalal dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar pengurus dan juga pemangku kepentingan yang ada pada 9 Mei 2024. Acara golf yang dilaksanakan di Golf Senayan menghadirkan 50 peserta yang terdiri dari pejabat Kementerian Luar Negeri (Kemlu), anggota Korps Diplomatik, perwakilan foreign chamber, serta pengurus Bidang Hubungan Internasional.



Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan Halalbihalal bersama dengan 200 hadirin, termasuk Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, perwakilan Kementerian Luar Negeri, para Duta Besar, dan perwakilan kamar dagang asing di Indonesia. Dengan suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan, acara ini menjadi momen berharga untuk saling bertukar pikiran dan memperkuat ikatan diplomatik.

PROGRAM PENGURUS

Merajut Sinergi: Kolaborasi Sektor Transportasi dan Logistik Kadin Indonesia



Sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu sektor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2023, yaitu mencapai 13,96% atau sekitar 1.200 triliun rupiah dari total PDB Indonesia. Diproyeksikan pada tahun 2024, pertumbuhannya naik menjadi 14,16% atau sekitar 1.400 triliun rupiah. Capaian dan potensi dari sektor ini, perlu terus ditingkatkan melalui berbagai inovasi untuk mendorong efektivitas dan efisiensi layanan transportasi dan logistik.

Melihat masa depan yang baik dari sektor transportasi dan logistik di Indonesia, Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan, Denon Prawiraatmadja mengadakan Kick Off Meeting Bidang Perhubungan pada 7 Mei 2024. Pertemuan ini dibuka oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi, Carmelita Hartoto. Ini bertujuan untuk membahas rencana kolaborasi antara Bidang Perhubungan Kadin Indonesia dengan Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia,

Selain itu, dalam pertemuan ini pengurus juga membahas agenda pelaksanaan Program Kerja Bidang Perhubungan untuk tahun 2024. Salah satu poin utama yang menjadi fokus adalah kunjungan ke daerah guna meningkatkan sektor transportasi, logistik, dan infrastruktur. Kegiatan ini diharapkan dapat membawa pembaruan dan peningkatan pada infrastruktur yang ada, serta memperkuat sinergi antar sektor yang berkepentingan.

Pengurus bidang juga berencana untuk aktif terlibat dalam beberapa acara berskala nasional dan internasional, seperti Heli Expo Asia, INSA Yacht Festival, INACA Festival, dan The 19th ITS Asia Pacific Forum. Harapannya, partisipasi dalam acara nasional dan internasional ini dapat memperluas jaringan dan meningkatkan kerja sama pelaku usaha dan bisnis Indonesia dengan berbagai pihak dari dalam dan luar negeri.

Program lain yang akan dilaksanakan adalah UMKM Go E-Commerce 2024, sebuah inisiatif untuk mengintegrasikan UMKM ke dalam ekosistem digital. Melalui program ini, diharapkan UMKM dapat lebih kompetitif dan memiliki akses yang lebih luas ke pasar yang lebih besar, sehingga akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

PROGRAM PENGURUS

Rapat Pimpinan Provinsi Kadin NTT Dorong Peningkatan Investasi dan Hilirisasi Komoditi



Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang digelar di Hotel Harper Kupang, Selasa (21/5/2024), dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, dan berbagai pejabat serta pelaku usaha, bertujuan untuk menjadi sarana koordinasi, sinkronisasi, serta penguatan Kadin NTT. Acara ini mengusung tema “Kebangkitan Ekonomi NTT Melalui Peningkatan Investasi dan Hilirisasi Komoditi” dan dihadiri oleh Ketua dari Kadin kabupaten/kota se-Provinsi NTT, dan jajaran pejabat Provinsi NTT.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT serta pemerintah kabupaten/kota yang telah berkolaborasi dengan pelaku usaha daerah melalui Kadin NTT dalam menjalankan berbagai program ekonomi. “Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ungkap Arsjad.

Pada kuartal pertama tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,11 persen year-on-year (yoy), sementara pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 3,61 persen. Kadin Indonesia menekankan pentingnya upaya menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global dan tekanan pasar keuangan, seperti fluktuasi nilai tukar dollar dan kenaikan harga minyak dunia yang dapat meningkatkan beban fiskal dan biaya produksi.

“Kunci dalam mengantisipasi dinamika ini adalah dengan mengelola risiko yang ada. Kita harus meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi baik di dalam negeri maupun global,” jelas Arsjad.

(lanjutan di halaman 11)

Kadin Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mendukung pengusaha nasional dan daerah. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program inovatif dan layanan yang merupakan bagian dari empat pilar utama program kerja Kadin Indonesia:

1. Pemulihan kesehatan dan pengembangan industri kesehatan nasional,
2. Pemulihan ekonomi daerah dan nasional,
3. Peningkatan kompetensi nasional dan daerah,
4. Penguatan internal organisasi Kadin.



Pengoptimalan pengusaha nasional dan daerah perlu dilakukan dengan meningkatkan kemudahan berusaha dan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui semangat kolaboratif, inklusif, dan gotong royong. Melalui Rapimprov ini, Kadin NTT diharapkan dapat menjadi katalis bagi peningkatan investasi dan hilirisasi di NTT, yang pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua Umum Kadin NTT, Bobby Lianto, menjelaskan bahwa pengurus Kadin NTT yang telah dilantik dan dikukuhkan di setiap daerah kabupaten dan kota di NTT, konsisten menjadi mitra strategis pemerintah di daerah. Kadin NTT juga berperan dalam membantu pelaksanaan ASEAN Summit di Labuan Bajo dan terus melakukan rapat koordinasi secara berkala setiap tiga bulan.

Dalam kesempatan tersebut, Kadin NTT memberikan Kadin NTT Award kepada 60 pengusaha dan mitra kerja Kadin. Diharapkan penghargaan ini bisa terus diberikan pada tahun-tahun mendatang.

Bobby Lianto juga memaparkan berbagai hasil kerja Kadin NTT, mulai dari fasilitasi impor dan ekspor, kerja sama dengan negara-negara maju, hingga memperbaiki layanan transportasi dari Kota Kupang ke daerah lainnya. Produk UMKM NTT kini telah berhasil menembus pasar Australia, Singapura, Hong Kong, dan China.

“Kadin NTT terus berupaya memaksimalkan peluang ini untuk mendukung ekonomi daerah dan nasional,” tutup Bobby Lianto.

PROGRAM PENGURUS

Tingkatkan Kualitas Keamanan Siber Nasional, Kadin Indonesia Gelar Pelatihan dan Sertifikasi CISO

Dalam era digital yang terus berkembang, keamanan siber telah menjadi prioritas utama bagi berbagai organisasi di seluruh dunia, khususnya dunia usaha dan industri. Laporan terbaru dari Cybersecurity Ventures, memperkirakan kerugian akibat kejahatan siber secara global mencapai USD10,5 triliun per tahun pada 2025. Di Indonesia sendiri, ancaman siber semakin meningkat seiring dengan percepatan transformasi digital di berbagai sektor. Menurut laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp24,9 triliun pada tahun 2021 akibat kejahatan siber.

Urgensi keamanan siber yang tinggi, mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk berkolaborasi dengan Nero Training Center (NTC) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia (LSP TIK) Global untuk mengadakan Pelatihan & Sertifikasi Chief Information dan Security Officer (CISO) batch pertama pada tanggal 23 Mei 2024 di Hotel Ibis Styles, Jakarta.

Pelatihan dan Uji Kompetensi CISO ini dirancang bagi para profesional yang ingin mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang keamanan siber. Program ini mengacu pada standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dalam pelatihan intensif ini, para peserta mempelajari berbagai aspek penting dalam keamanan siber, termasuk pengelolaan siklus informasi, evaluasi kelemahan keamanan, dan manajemen risiko keamanan informasi. Selain itu, program ini juga mencakup pengelolaan prosedur keamanan informasi, sertifikasi dan akreditasi, serta perencanaan dan pengelolaan sistem backup yang menjawab kebutuhan perusahaan dan industri di Indonesia.

Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesiapan profesional keamanan siber di Indonesia, sehingga diharapkan mampu menghadapi berbagai ancaman yang semakin kompleks.

Para peserta dari batch pertama kemudian menerima sertifikat dalam acara "Innovation Day" pada tanggal 29 Mei 2024, di Hotel Fairmont Jakarta.



Pembahasan Roadmap Hilirisasi dalam Rapat Koordinasi Bidang ESDM dan Perindustrian

Pada tanggal 20 Mei 2024, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi Carmelia Hartoto, dan Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Solihin Kalla, dan Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Bobby Gafur Umar, menggelar rapat koordinasi di Menara Kadin Indonesia. Agenda rapat meliputi pembahasan rencana Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang ESDM dan Perindustrian, serta penyusunan Roadmap Hilirisasi usulan dari dunia usaha nasional untuk memperkuat fokus utama pemerintah untuk memperkuat sektor industri nasional.

Roadmap Hilirisasi merupakan sebuah rencana strategis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas melalui pengolahan dan pemurnian lebih lanjut sebelum diekspor atau dijual di pasar domestik. Dalam rapat koordinasi ini, penyusunan Roadmap Hilirisasi disepakati untuk komoditas berikut nikel, tembaga, dan beberapa mineral lainnya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan hilirisasi sebagai strategi kunci untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki. Sebagai contoh, hilirisasi nikel diharapkan dapat mendukung pengembangan industri baterai listrik, yang merupakan salah satu industri masa depan dengan prospek cerah. Sementara itu, hilirisasi tembaga bertujuan untuk mendukung industri elektronik dan energi terbarukan.



Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2023 nilai ekspor nikel Indonesia naik 14,75% (YoY) menjadi USD 6,8 miliar atau sekitar Rp106,59 triliun. Selain itu, proyek-proyek pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga juga mengalami peningkatan, dengan beberapa smelter baru yang diharapkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2024. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong industrialisasi berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan.



Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi ini, nantinya akan dilaksanakan rapat yang membahas penyusunan kepanitiaan Rakornas Bidang ESDM dan Perindustrian, guna menyatukan visi pemangku kepentingan dan memastikan implementasi Roadmap Hilirisasi berjalan sesuai dengan rencana. Melalui koordinasi yang baik dan perencanaan matang, roadmap ini diharapkan dapat mendorong transformasi ekonomi Indonesia, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, membuka lapangan kerja baru, dan mendukung pembangunan industri berkelanjutan.



PROGRAM PENGURUS

Membangun Masa Depan Ekonomi Indonesia melalui Forum Investasi 2024



Kadin Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Investasi/BKPM, berencana menyelenggarakan Forum Investasi pada tahun 2024. Pertemuan ini nantinya akan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk para investor internasional dan nasional yang bertujuan untuk membahas peluang dan tantangan investasi di Indonesia.



Pada Rabu, 22 Mei 2024 lalu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi, Yukki N. Hanafi, bersama Wakil Ketua Umum Bidang Investasi, Tony Wenas, mengadakan pertemuan dengan Kementerian Investasi/BKPM. Diskusi ini mencakup berbagai aspek strategis dan teknis pelaksanaan forum. Melalui forum ini, Kadin Indonesia berharap dapat memperkenalkan potensi investasi Indonesia yang akan menarik lebih banyak investasi asing dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai tambahan informasi, investasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut data BKPM, target investasi yang tercapai pada tahun 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun, sebuah pencapaian signifikan yang menunjukkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Untuk tahun 2024, BKPM menargetkan investasi sebesar Rp1.650 triliun, yang diharapkan dapat semakin memperkuat posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Dalam rangka mencapai target investasi tersebut, forum yang akan di gelar ini akan menjadi ajang untuk mempromosikan kebijakan dan proyek-proyek strategis nasional yang dapat menarik minat investor. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperbaiki regulasi dan stabilitas ekonomi agar iklim investasi tetap kondusif.

PROGRAM PENGURUS

Kadin Indonesia Dorong Kopi Sumsel ke Kancan Internasional

Pada tahun 2023, Sumatera Selatan mencatat prestasi luar biasa dengan memproduksi sekitar 27% dari total produksi kopi nasional. Menyadari potensi besar ini, Kadin Indonesia bersama Kadin Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan pemerintah setempat menggelar acara "Morning Coffee & Launching Kopi Sumsel" pada tanggal 12 Mei 2023, di Palembang. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan Kopi Sumsel kepada pasar yang lebih luas dan meningkatkan profilnya di kancan nasional dan internasional.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengungkapkan optimisme besar terhadap masa depan Kopi Sumsel. Ia menekankan pentingnya memposisikan Kopi Sumsel sebagai pilihan utama bagi dunia usaha, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Menurutnya, potensi kopi dari Sumatera Selatan sangat besar dan bisa menjadi komoditas unggulan yang membawa nama Indonesia ke panggung kopi internasional.



Acara ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari Kadin Indonesia, termasuk Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Yukki N. Hanafi, Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera Teuku Zulham, Kepala Badan Pengembangan UMKM dan Koperasi R. M. Tedy Aliudin, dan Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatera Selatan Aji Affandi Udji. Kehadiran para pemangku kepentingan utama ini menunjukkan komitmen kuat dari berbagai pihak untuk mendukung perkembangan industri kopi di Sumatera Selatan.

Dengan inisiatif ini, Kadin Indonesia berharap dapat meningkatkan daya saing kopi Sumsel di pasar global. Dukungan yang kuat dari pemerintah daerah dan pengusaha lokal diharapkan bisa mendorong peningkatan kualitas dan volume produksi kopi. Selain itu, strategi pemasaran yang tepat akan membantu memperkenalkan Kopi Sumsel ke berbagai belahan dunia, menjadikannya salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia.

PROGRAM INTERNAL

Strategi Kadin Indonesia untuk Mendukung Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Nasional



Pada tanggal 13 Mei 2024, Kadin Indonesia mengadakan pertemuan Dewan Penasehat, dimana Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, Muhammad Chatib Basri, memberikan update terkini mengenai perkembangan perekonomian global dan nasional. Lebih lanjut, pertemuan ini membahas dinamika ekonomi global dan nasional, serta merumuskan strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% di Indonesia. Diskusi ini menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah untuk memastikan target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai.

Chatib menyoroti perlunya adaptasi terhadap dinamika ekonomi global yang terus berubah. Beliau menekankan pentingnya meningkatkan daya saing melalui inovasi teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia perlu fokus pada pengembangan industri berbasis teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk menghadapi tantangan global.

Salah satu strategi yang diusulkan adalah mendorong investasi di sektor-sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti sektor manufaktur, digital, dan energi terbarukan. Investasi di sektor-sektor ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas nasional. Selain itu, perbaikan infrastruktur dan penyederhanaan regulasi juga menjadi poin penting dalam diskusi tersebut.

Hasil dari diskusi ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif. Kadin Indonesia berharap agar pemerintah dapat mengambil tindakan yang tepat berdasarkan rekomendasi ini, sehingga target pertumbuhan ekonomi 6% dapat tercapai dalam waktu yang telah ditentukan. Kolaborasi antara sektor bisnis dan pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Paparan mengenai update perekonomian nasional ini disambut antusias oleh para anggota Dewan Penasehat Kadin Indonesia, dimana turut hadir Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia, MS Hidayat.



Perayaan Paskah dan Kenaikan Yesus Kristus Bersama Kadin Indonesia



Pada 10 Mei 2024, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengadakan perayaan yang istimewa untuk memperingati Paskah dan Kenaikan Yesus Kristus. Acara ini dihadiri oleh keluarga besar Kadin Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum, Arsjad Rasjid, beserta para pengurus. Dalam suasana penuh kesakralan, mereka menghadiri perayaan seremonial bersama yang bertujuan untuk merayakan momen kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus.



Dalam sambutannya, Arsjad Rasjid menekankan pentingnya perayaan ini sebagai ajang untuk membangun harmoni dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Kadin Indonesia, sebagai salah satu wadah utama dunia usaha dan industri nasional, tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pengembangan kapasitas manusia dan menciptakan keharmonisan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan negara.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kadin Indonesia dalam memelihara nilai-nilai kebersamaan dan toleransi di antara para pengurus dan anggota. Semangat persaudaraan yang tercipta dalam momen ini juga menunjukkan bahwa perayaan Paskah dan Kenaikan Yesus Kristus tidak hanya merupakan peringatan keagamaan, tetapi juga momentum untuk memupuk solidaritas dan kesatuan di kalangan dunia usaha Indonesia.

Perayaan ini adalah bukti konkret bahwa Kadin Indonesia tidak hanya menjadi penggerak ekonomi nasional, tetapi juga agen perubahan dalam membangun kesadaran akan pentingnya harmoni sosial di tengah-tengah perbedaan. Dengan semangat ini, Kadin Indonesia berharap dapat terus menjadi pionir dalam mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, sambil mempromosikan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Sinergi Kadin dan HIPPI dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045



Pada tanggal 20 Mei 2024, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, memberikan sambutan pembuka dalam acara Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Periode 2023-2028. Dalam pidatonya, Arsjad menekankan pentingnya semangat Pancasila, khususnya "Persatuan Indonesia", sebagai landasan untuk mendorong kolaborasi yang lebih erat antara HIPPI dan Kadin Indonesia.

Arsjad berharap kolaborasi ini akan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045, dimana secara khusus menekankan pada penciptaan lebih banyak pengusaha baru yang inovatif dan berorientasi ekspor, terutama ke pasar non-tradisional. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk barang dan layanan jasa yang berasal dari Indonesia di pasar global, sekaligus memajukan ekonomi daerah melalui inovasi yang meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal.



Sebagai organisasi yang menaungi seluruh organisasi dunia usaha di Indonesia, Kadin Indonesia siap berkolaborasi dengan HIPPI untuk membangun dunia usaha yang tangguh dan kompetitif dalam semangat gotong royong. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat peran pengusaha dalam menggerakkan perekonomian nasional dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Dalam konteks ini, kolaborasi antara Kadin Indonesia dan HIPPI menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem bisnis yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi Indonesia.

Sebagai penutup, Arsjad menegaskan kembali komitmen Kadin Indonesia untuk terus bekerja sama dengan HIPPI dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Bersama-sama, mereka akan mengembangkan strategi dan inisiatif yang mendukung pengembangan usaha lokal, peningkatan daya saing internasional, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Dengan semangat persatuan dan kolaborasi, Kadin Indonesia dan HIPPI optimis dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kolaborasi Kadin Indonesia dan KPK: Strategi Pencegahan Korupsi dalam Sektor Industri

Korupsi berdampak negatif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan geliat dunia usaha di Indonesia. Tidak hanya berpengaruh terhadap kemudahan berusaha bagi pelaku usaha, korupsi juga memengaruhi secara negatif keputusan kesiapan investor asing dalam melakukan ekspansi bisnis di Indonesia. Per tahun 2023, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih belum menunjukkan perubahan berarti dengan skor 43 dari 100, dibandingkan dengan negara maju seperti Denmark dan Finlandia yang masing-masing mendapatkan skor 90 dan 87.



Kadin Indonesia sebagai perwakilan organisasi dunia usaha Indonesia melihat peluang bagi sektor usaha untuk berkontribusi dalam pencegahan korupsi. Pada tanggal 3 Mei 2024, Bidang Asosiasi dan Himpunan melalui Komtap Koordinasi Asosiasi Industri Pengolahan Logam, Mesin, dan Baja bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan yang dihelat di Menara Kadin Indonesia ini mendorong kolaborasi antara pelaku usaha dan industri bersama KPK merancang program pencegahan korupsi pada sektor industri logam, mesin, dan baja.

Melalui kolaborasi dengan KPK berharap dapat mendukung terciptanya ekosistem bisnis yang semakin kondusif dan sehat di Indonesia.



KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kolaborasi Kadin & Apkasi dalam Forum Bisnis Daerah



Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjourang, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim, dan perwakilan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengadakan pertemuan guna membahas isu utama yang mempengaruhi perekonomian nasional. Pertemuan ini dilaksanakan di kantor APKASI.

Dalam pertemuan ini perwakilan dari APKASI menyampaikan harapan mereka, agar Kadin Indonesia dapat membantu melindungi pelaku usaha dari tantangan ekonomi ke depan, khususnya yang diakibatkan oleh dinamika geopolitik dunia.

Menanggapi hal ini, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN), dan Kadin Indonesia sepakat untuk merumuskan strategi komprehensif guna melindungi pelaku usaha.

Pertemuan ini juga membahas persiapan kegiatan Forum Bisnis Daerah (Forbisda). Kegiatan ini diharapkan menjadi platform strategis yang memperkuat kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah daerah serta mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia.



KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kadin Indonesia Rangkul UMKM di Expo Dekranas Solo untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045



Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, yang menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sebagian besar tenaga kerja di negara ini. Mengakui pentingnya peran UMKM, Kadin Indonesia terus merangkul dan mendukung pelaku usaha dalam kategori ini sektor ini melalui berbagai inisiatif, salah satunya dengan berpartisipasi dalam Expo Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) 2024 yang berlangsung di Solo pada 14-16 Mei 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kadin Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana penguatan UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pelaku UMKM dari seluruh Indonesia, dan Kadin Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan pemahaman terkait mendalam mengenai manfaat bergabung dengan keanggotaan Kadin Indonesia kepada para peserta pameran. Kegiatan ini menciptakan merupakan peluang emas bagi para pelaku UMKM untuk menjadi bagian dari ekosistem Kadin Indonesia, yang luas. di mana mereka dapat mempelajari berbagai keuntungan keanggotaan dan bahkan mendaftar langsung di lokasi acara.



Dalam pameran ini, Kadin Indonesia juga mempersembahkan buku "Peta Jalan Indonesia Emas 2045" kepada Loemongga Agus Gumiwang. Buku ini menggambarkan berbagai strategi dan langkah yang perlu diambil untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, dengan penekanan pada penguatan sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

(lanjutan di halaman 22)

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, bersama dengan Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika, Firlie Ganinduto, menggalakkan kampanye "Ayo Berkadin!" kepada UMKM yang menjadi peserta Dekranas. Kampanye ini bertujuan untuk mengajak lebih banyak UMKM bergabung dengan Kadin Indonesia, serta memanfaatkan berbagai program dan layanan yang ditawarkan.

Selain itu, Kadin Indonesia juga menyediakan pelayanan pendaftaran keanggotaan langsung sebagai anggota Kadin langsung di lokasi acara. Hal ini memudahkan para pelaku UMKM untuk segera menjadi bagian dari ekosistem pengembangan UMKM Kadin Indonesia dan langsung merasakan manfaat keanggotaan, seperti akses ke jaringan bisnis yang lebih luas, program pelatihan, dan berbagai dukungan lainnya.



Kegiatan Expo Dekranas 2024 ini juga menjadi ajang penting bagi UMKM untuk memamerkan produk-produk unggulan mereka, menjalin jaringan bisnis baru, serta memperoleh wawasan dan pengetahuan yang dapat membantu mereka dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Dengan dukungan Kadin Indonesia, diharapkan UMKM dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.



Jadi Perwakilan Dunia Usaha, Kadin Indonesia Dukung Peran Strategis Indonesia dalam 10th World Water Forum di Bali



Air merupakan isu penting yang mempengaruhi kualitas hidup makhluk hidup, baik saat ini dan masa yang akan mendatang, sehingga keberlanjutannya harus dipastikan guna menjaga kesejahteraan dan kelestarian bumi. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang 62% dari kondisi geografisnya terdiri dari wilayah perairan, pengelolaan air mulai dari perlindungan sumber daya alam hingga penanggulangan bencana alam yang berkaitan dengan air, menjadi tantangan tersendiri.

Pada tanggal 20-21 Mei 2024, Wakil Ketua Umum Bidang PUPR & Infrastruktur, Insannul Kamil dan Pengurus Bidang Pertanian menghadiri dalam rangkaian acara 10th World Water Forum yang diadakan di Bali. Forum internasional yang mengusung tema "Water for Shared Prosperity", berhasil mengumpulkan pemangku kepentingan dari seluruh dunia untuk berdiskusi dan menangani isu-isu penting terkait air.

World Water Forum, yang diadakan setiap tiga tahun sekali, merupakan konferensi terbesar di dunia yang membahas isu-isu terkait air mencakup pengelolaan air bersih, sanitasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Gelaran ini juga menjadi forum untuk berdialog, bertukar pengetahuan dan kolaborasi antara perwakilan pemerintah, pemimpin sektor swasta, akademisi serta masyarakat sipil yang berfokus pada upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Kadin dalam forum internasional ini menunjukkan komitmen dunia usaha Indonesia terhadap peningkatan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antarkomunitas internasional, khususnya dalam sektor pertanian dan infrastruktur.

Dengan berperan aktif dalam gelaran seperti 10th World Water Forum, Indonesia memperkuat perannya di level global dalam mencapai kesejahteraan bersama melalui pengelolaan air yang berkelanjutan. Komitmen ini juga penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif serta diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan sumber daya air di Indonesia dan dunia.

Peningkatan Kerjasama Ekonomi Indonesia dan China melalui Delegasi CCCME



Kadin Indonesia melalui Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional dan Komite Indonesia-Tiongkok (KIKT) menyambut kunjungan delegasi China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME). Pertemuan yang berlangsung di Menara Kadin Indonesia ini bertujuan untuk membahas peningkatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China, khususnya di beberapa sektor penting.



Delegasi CCCME dan Kadin Indonesia mendiskusikan peluang kerjasama di sektor tambang, minyak, agrikultur, dan industri laut. Kadin Indonesia melihat potensi besar dalam meningkatkan hubungan perdagangan di sektor-sektor ini, yang dapat membawa manfaat signifikan bagi kedua negara. Pertemuan ini juga mencerminkan komitmen kuat kedua belah pihak untuk memperdalam hubungan ekonomi yang sudah terjalin.

Salah satu gagasan utama yang disampaikan oleh Kadin Indonesia adalah penerapan sistem barter dalam kerjasama perdagangan antar kedua negara. Sistem barter yang disebut *resources trading* ini, diusulkan sebagai solusi inovatif untuk mengoptimalkan perdagangan komoditas antara Indonesia dan China. Dengan sistem ini, kedua negara dapat saling bertukar komoditas sesuai kebutuhan masing-masing tanpa melibatkan transaksi moneter langsung, sehingga dapat mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan efisiensi.

Penerapan sistem barter ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi Indonesia untuk mengeksport lebih banyak produk unggulan, seperti hasil tambang dan produk agrikultur, ke China. Di sisi lain, Indonesia juga dapat mengimpor mesin dan produk elektronik dari China dengan lebih mudah. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian kedua negara dan menciptakan hubungan dagang yang lebih seimbang dan saling menguntungkan.

Lebih lanjut, pertemuan ini menandai langkah maju dalam hubungan ekonomi antara Indonesia dan China. Dengan komitmen untuk terus memperkuat kerjasama di berbagai sektor, kedua negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Kadin Indonesia Apresiasi Langkah Pemerintah Indonesia Gabung dengan OECD



Kadin Indonesia selaku perwakilan dunia usaha Indonesia menyambut dan mendukung keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Keputusan ini dianggap sebagai langkah yang tepat bagi Indonesia untuk melaksanakan reformasi dan perbaikan kebijakan guna memperbaiki iklim investasi dan ekonomi dalam negeri, dan mendorong potensi pertumbuhan ekonomi tanah air. Bergabungnya Indonesia dengan OECD juga dianggap sebagai langkah strategis guna memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Sehubungan dengan hal ini, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri, Shinta W. Kamdani, bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, pada Selasa, 28 Mei 2024. Dalam pertemuan tersebut, Kadin Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintah Indonesia dalam proses bergabung dengan OECD. Bergabungnya Indonesia dengan OECD dianggap sebagai langkah strategis guna memperkuat posisi Indonesia di kancah global, untuk itu Kadin Indonesia siap untuk mendukung penuh proses ini.

(lanjutan di halaman 26)

Pertumbuhan pendapatan per kapita di Indonesia membutuhkan peningkatan produktivitas yang didorong oleh investasi yang bersifat capital-labor intensive. Proses onboarding menjadi anggota OECD membuka kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat reformasi kebijakan. Saat ini Indonesia sedang berada dalam tahap legal review, dan pemerintah Indonesia kini sedang membandingkan dan mengkaji instrumen kebijakan yang menjadi fokus area dari OECD.

Dalam rangka ini, Kadin Indonesia siap mendukung proses ini dan sedang membentuk tim khusus yang akan fokus pada persiapan Indonesia untuk memenuhi standar internasional yang diperlukan oleh OECD. Tim ini bertugas untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan sepenuhnya keanggotaannya dalam OECD, serta dapat bersaing dan berkolaborasi secara efektif dengan anggota OECD lainnya.

Proses bergabung dengan OECD adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas regulasi, memperkuat tata kelola perusahaan, dan mempromosikan investasi asing yang lebih besar. Kadin Indonesia meyakini bahwa kerja sama dengan OECD akan membantu Indonesia mencapai kemajuan yang signifikan di berbagai sektor ekonomi.



Keterlibatan Kadin dan dunia usaha di Indonesia menjadi semakin penting, karena 26 sektor yang menjadi fokus OECD, seperti pertanian, perdagangan, investasi, UMKM, perikanan, kebijakan ekspor dan lainnya, merupakan sektor-sektor yang strategis dan melibatkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Kadin Indonesia menekankan pentingnya untuk melibatkan sektor swasta, termasuk anggota Kadin Indonesia, sepanjang proses onboarding menjadi anggota OECD.

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN

Gandeng PersolKelly, Kadin Indonesia Pacu Peningkatan Kualitas SDM Indonesia



Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia hingga Agustus 2023 mencapai sebesar 5,32%. Selain itu, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal kualitas tenaga kerja, dimana sekitar 58% dari tenaga kerja Indonesia hanya memiliki pendidikan hingga jenjang SMP atau lebih rendah. Oleh sebab itu, kualitas SDM yang mumpuni merupakan prasyarat dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kadin Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PersolKelly pada Rabu, 29 Mei 2024. Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama penyediaan menyediakan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi, Adi Mahfudz, turut hadir menandatangani MoU ini secara langsung bersama dengan Sonny Subhan, Direktur PersolKelly Consulting Indonesia.



Lewat kerja sama ini, Kadin dan PersolKelly berkomitmen untuk mengembangkan program pelatihan yang tidak hanya relevan dengan perkembangan industri tetapi juga mampu meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Adi Mahfudz menyatakan bahwa kolaborasi ini memberikan harapan bagi pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk siap bersaing di pasar global.

PersolKelly, sebagai salah satu penyedia layanan SDM terbesar di Asia Pasifik, memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengembangkan program pelatihan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam MoU ini, PersolKelly akan membantu Kadin dalam menyusun kurikulum pelatihan yang sesuai dengan tren industri terkini dan kebutuhan spesifik dari berbagai sektor usaha.

Jangkau Lebih Banyak Partisipasi Asosiasi Sektor, Kadin Indonesia Adakan Pertemuan Asistensi Bersama Calon Anggota Luar Biasa (ALB)



Sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha di Indonesia, Kadin terus berusaha untuk menjangkau dan meningkatkan partisipasi dari seluruh Asosiasi industri di Indonesia. Diharapkan dengan meningkatkan partisipasi dari asosiasi dan organisasi pengusaha di berbagai sektor, Kadin semakin memperkuat perannya dalam mewakili dunia usaha beradvokasi dan menciptakan iklim kebijakan bisnis dan ekonomi yang kondusif di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan, Wisnu Pettalolo, bersama dengan Ketua Komite Tetap Keanggotaan ALB mengadakan pertemuan asistensi bersama tiga asosiasi calon ALB tanggal 7 Mei 2024, di Menara Kadin Indonesia. Ketiga asosiasi sektoral tersebut antara lain, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN), dan Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND). Sebagai informasi, berikut ini adalah profil singkat dari ketiga calon ALB Kadin.

1. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) adalah asosiasi perusahaan-perusahaan jasa berbadan hukum yang bergerak di bidang periklanan. Saat ini anggota P3I berjumlah kurang lebih 500 perusahaan yang tersebar di 23 provinsi di wilayah hukum Republik Indonesia.
2. Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) merupakan asosiasi sending organization untuk pemegang kerja teknis yang didirikan pada tahun 2015, dan telah diakui oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Asosiasi ini berkontribusi pada pengembangan hubungan kedua negara, termasuk mempromosikan sistem biaya sesuai dengan yang dibayarkan oleh pemegang kerja teknis kepada sending organization.
3. Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) didirikan di Jakarta untuk menghimpun para pengusaha kecil, menengah dan besar dalam sebuah wadah kolaborasi yang terhimpun dari perusahaan dari perusahaan dan asosiasi asosiasi pengusaha berbagai bidang. Saat ini, KEIND telah terbentuk di 28 Provinsi di Indonesia dan berbagai kabupaten / kota serta perwakilan luar negeri

Proses asistensi bagi calon ALB diharapkan dapat mempermudah dan membantu mereka untuk onboarding dan berpartisipasi dalam kegiatan Kadin Indonesia.





Dorong Percepatan Digitalisasi di Solo, Kadin Indonesia berkolaborasi dengan Kadin Kota Surakarta dan PANDI

Kadin Indonesia terus menjaga komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Sebagai wujud dari komitmen ini, pada tanggal 31 Mei sampai 1 Juni 2024, Kadin Indonesia bekerja sama dengan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dan Kadin Kota Surakarta, serta platform pembelajaran dan bakat digital, eduCLaaS menyelenggarakan kegiatan “UMKM Go Digital!” di Omah Sinten, Surakarta. Kegiatan yang diikuti oleh UMKM di wilayah Solo Raya, diharapkan dapat mempercepat proses onboarding digital mereka.

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia, Firlie H Ganinduto, mengatakan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dari segi waktu dan biaya operasional bagi UMKM hingga 50%, serta meningkatkan peluang dalam berbisnis sebesar 2,5 kali lipat. Data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan, UMKM yang go digital di tahun 2023 telah mencapai 22,8 juta. Pihak pemerintah menargetkan angka ini meningkat menjadi 30 juta di tahun 2024.

Kegiatan UMKM Go Digital! di Solo melanjutkan keberhasilan kegiatan serupa di Yogyakarta yang diselenggarakan pada bulan Maret lalu. Kegiatan UMKM Go Digital! di kota Solo diikuti oleh 100 pelaku UMKM. Selain memperoleh wawasan digital, para pelaku UMKM juga menerima domain .id selama 1 tahun secara gratis sebagai manfaat tambahan. Domain ini diharapkan dapat mempercepat onboarding digital UMKM.

Ketua Kadin Kota Surakarta, Ferry Sephta Indrianto, menjelaskan bahwa kota Surakarta memiliki potensi luar biasa dengan 13.200 UMKM yang terdaftar hingga tahun 2023. Ferry berharap dengan percepatan onboarding digital UMKM di Kota Surakarta serta Solo Raya, daya saing dan kemampuan ekonomi UMKM akan meningkat.

Dalam kegiatan yang sama, Ketua PANDI, John Sihar Simanjuntak, juga menyampaikan komitmen dari PANDI untuk mendukung digitalisasi UMKM nasional melalui pemberian 1 juta domain .id sepanjang 2024. CEO eduCLaaS, Leslie Loh, juga menyatakan komitmen dari institusinya untuk mendukung transformasi digital bagi UMKM nasional.

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa pada tahun 2023, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto adalah sebesar 61%, diikuti dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 117 juta atau 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.





SPECIAL SECTION: PELUNCURAN LEMBAGA MEDIASI
SENGKETA BISNIS KADIN INDONESIA

Penguatan Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia: Upaya Partisipasi Aktif Kadin dalam rangka Mendorong Peningkatan Kepastian Hukum di Indonesia

Dengan semakin kompleks dan berkembangnya model bisnis di Indonesia pada saat ini, maka potensi resiko sengketa bisnis yang dialami pengusaha di Indonesia turut meningkat. Oleh sebab itu, dibutuhkan layanan mediasi sengketa bisnis yang semakin beragam. Salah satunya melalui pendekatan mediasi. Pada tahun 2011, Kadin Indonesia telah memperkenalkan inisiatif lembaga mediasi. Kemudian, pengurus memutuskan untuk melakukan penguatan terhadap layanan lembaga mediasi Kadin Indonesia pada tahun 2024.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia menghadirkan alternatif layanan penyelesaian sengketa bisnis yang mengedepankan efisiensi, efektivitas serta profesionalisme bagi dunia usaha.

“Hadirnya Lembaga Mediasi Sengketa Kadin Indonesia, menjadi solusi alternatif penyelesaian sengketa bisnis dan usaha. Melalui mediasi, maka penyelesaian masalah sengketa diharapkan dapat dilakukan secara konsensus, efisien dan damai,” ujar Arsjad.

Lembaga ini tidak hanya bertugas sebagai mediator tetapi juga bekerja sama dengan lembaga mediasi nasional dan internasional. Kedepannya, lembaga ini diharapkan dapat menjalankan peran Kadin dalam peningkatan kompetensi mediator.

(lanjutan di halaman 31)



Selanjutnya, Pengurus Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia juga merupakan tenaga profesional yang bekerja secara independen dan wajib melapor kepada Ketua Umum Kadin Indonesia, selaku penanggung jawab, jika ada pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dikeluarkan oleh lembaga.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono mengatakan, ada dua layanan yang ditawarkan Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia, yaitu mediasi komersial, mediasi pro bono untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah terkurasi sesuai standar, serta layanan pembinaan dalam bentuk pelatihan mediator dan sertifikasi serta akreditasi mediator.



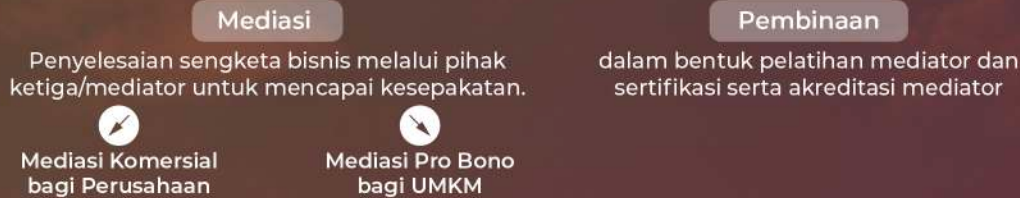
“Seluruh layanan ini diperlukan dalam ekosistem bisnis Indonesia yang sangat dinamis. Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia nantinya dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota Kadin dan pengusaha Indonesia, baik dari skala kecil, menengah, hingga besar,” ucap Dhaniswara. Keutamaan lembaga ini yakni memiliki mediator yang paham dunia usaha, sehingga bisa memberikan alternatif solusi yang terbaik dalam kasus sengketa bisnis.

Guna menunjang peran Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia dalam menyelesaikan sengketa bisnis secara efisien dan efektif, Kadin Indonesia juga akan berkolaborasi dengan sejumlah mitra strategis, mulai dari pelaku usaha di bidang UMKM dan koperasi, industri, perdagangan, serta asosiasi dan himpunan kementerian hingga lembaga terkait seperti Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi/BKPM, dan lainnya.

“Kami berharap seluruh pelaku bisnis dan industri dari skala UMKM hingga besar, dapat memanfaatkan layanan yang diberikan oleh Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia. Lembaga ini tidak hanya tentang penyelesaian sengketa, tetapi juga tentang pembangunan dunia usaha secara damai dan berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, kita bisa menciptakan iklim bisnis yang inklusif, berkelanjutan, dan kolaboratif,” tandas Arsjad.

Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia adalah fasilitas hukum organisasi yang memberikan manfaat bagi anggota Kadin dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Beberapa Jenis Layanan yang diberikan oleh Kadin Indonesia



Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia



Cara Mendapatkan Layanan



Untuk Informasi Lanjutan
Silahkan Hubungi:

Hotline Kadin Indonesia

+62-811-9631-0204



SPECIAL SECTION: PRESS CONFERENCE KADIN INDONESIA
SIAPKAN USULAN WHITEPAPER KEBIJAKAN EKONOMI

Gotong Royong Sukseskan Program Pemerintahan 2024-2029, Kadin Indonesia Siapkan Usulan Whitepaper Kebijakan Ekonomi

Pada tanggal 29 Mei 2024, 24 Ketua Umum Kadin Daerah bertemu dengan Ketua Umum Kadin Indonesia dalam rangka membicarakan isu-isu prioritas yang menjadi perhatian dari dunia usaha saat ini dan 5 tahun kedepan. Tiga isu prioritas tersebut adalah esensial dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045, dan dibicarakan di dalam rapat forum Ketua Umum Kadin Daerah.

Kadin Indonesia mengidentifikasi bahwa terdapat tiga isu ekonomi yang perlu diperhatikan dalam lima tahun ke depan. Hal tersebut mencakup, optimalisasi sektor-sektor strategis, penguatan kapasitas UMKM serta peningkatan kesejahteraan kelas menengah. Keberhasilan mengatasi isu-isu ini akan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, kolaborasi serta gotong royong antara pemerintah, dunia usaha dan pemangku kepentingan sangat penting.

Sehubungan dengan isu-isu strategis ekonomi yang dihadapi dunia usaha serta pengembangan program pemerintah 5 (lima) tahun kedepan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sedang menyiapkan whitepaper berisi usulan dan masukan dari pelaku usaha di berbagai sektor dan daerah, investor serta akademisi. Usulan dan masukan Kadin ini diharapkan dapat memperkuat dan menyukseskan program pembangunan 2024-2029, serta mendorong implementasi Asta Cita dan 17 program prioritas pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Inisiatif ini juga menegaskan komitmen Kadin Indonesia terhadap pemerintah dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

(lanjutan di halaman 34)

“Sebagai induk organisasi yang mewadahi dunia usaha serta mitra strategis pemerintah bidang perekonomian, Kadin Indonesia siap bergotong royong menyukseskan program pemerintah 2024-2029 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan merealisasikan cita-cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai negara maju dan keluar dari jebakan kelas menengah (middle-income trap),” kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid.

“Whitepaper yang sedang disiapkan Kadin Indonesia berisi usulan dan masukan di bidang ekonomi yang nantinya disampaikan ke pemerintah dan diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan pembangunan ekonomi jangka menengah” papar Arsjad lebih lanjut.

Selain menampung usulan dan masukan dari asosiasi industri di berbagai sektor dan berbagai daerah, Kadin Indonesia juga akan melibatkan investor, lembaga riset, universitas dan akademisi, organisasi masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan whitepaper melalui survei dan diskusi.

“Penyusunan whitepaper ini akan dilakukan secara inklusif dan kolaboratif, dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakan. Termasuk dalam isi whitepaper adalah rekomendasi fokus area pembangunan yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan realisasi program prioritas pemerintah 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu, whitepaper ini juga berkesinambungan dengan Roadmap Indonesia Emas 2045 yang Kadin luncurkan tahun lalu,” kata Arsjad.

Sebagaimana telah diketahui publik, Kadin Indonesia telah membuat Peta Jalan Indonesia Emas 2045 yang menjadi panduan bagi dunia usaha sekaligus melengkapi roadmap yang disusun pemerintah untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.





SPECIAL SECTION: INDONESIA CATALOGUE EXPO DAN FORUM 2024

Tingkatkan Peran Serta Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Kadin Indonesia dan LKPP Gelar ICEF 2024

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Indonesia Catalogue Expo dan Forum (ICEF) di JIEXPO Kemayoran. Acara ini diselenggarakan untuk kedua kalinya dan bertujuan untuk mempromosikan penggunaan E-Katalog sekaligus partisipasi dari pengusaha swasta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.



Turut menghadiri dalam seremoni pembukaan ICEF 2024 adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan. Dalam kesempatan ini beliau mengapresiasi ICEF sebagai langkah penting dalam mendorong kolaborasi antara pemerintah dan swasta guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta transformasi digital yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan ekonomi nasional.

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie dalam sambutan pembukaannya, menyampaikan harapannya bahwa ICEF 2024 dapat menjadi tempat kolaborasi bagi para pengusaha dan industri dalam negeri kepada para konsumen untuk mengakselerasi terwujudnya Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Beliau juga menekankan bahwa Kadin Indonesia siap mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam negeri melalui penguatan penggunaan produk dalam negeri.

Turut menghadiri juga kegiatan ICEF 2024, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, menekankan pentingnya E-Katalog versi 6 yang diluncurkan oleh LKPP untuk menciptakan sistem pengadaan lebih kompetitif dan transparan. "Pameran ini sangat signifikan karena tidak hanya meningkatkan peluang transaksi bisnis melalui pengadaan pemerintah, tetapi juga mengoptimalkan layanan bagi seluruh stakeholder. Dengan E-Katalog, sistem pengadaan lebih kompetitif dan transparan sehingga dapat menguntungkan bagi pembeli maupun penjual. Transformasi digital ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan meningkatkan daya saing mereka dalam ekosistem bisnis yang semakin inklusif," ujarnya.

Sosialisasi RUU Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Sebagai bagian dari rangkaian ICEF 2024, diselenggarakan beberapa sesi talkshow dan diskusi. Salah satunya mengangkat tema sosialisasi RUU Pengadaan Barang dan Jasa serta dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan, Wisnu W. Pettalolo, sebagai salah satu narasumber. Dalam kesempatan ini, WKU Bidang Asosiasi dan Himpunan menekankan pentingnya pemahaman RUU PBJ Publik bagi pemerintah, serta konsultasi bersama dunia usaha guna memastikan terciptanya iklim kolaborasi pihak swasta dan pemerintah yang dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi.



Selain seminar dengan tema sosialisasi RUU Pengadaan Barang dan Jasa, terdapat juga sesi seminar dengan tema "Optimalisasi Penggunaan E-Katalog Lokal Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah serta Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif", yang dimoderatori oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang dan dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Barat, Cucu Sutara, sebagai salah satu narasumber.

Dalam berbagai dialog yang tersaji sepanjang ICEF, Kadin melihat adanya langkah-langkah strategis yang perlu segera dilakukan untuk memperkuat sinergi pemerintah dan swasta terkait dengan pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan inisiatif E-Katalog. Kedua sesi seminar tersebut mencerminkan peran aktif serta komitmen Kadin Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengadaan pemerintah melalui penggunaan e-katalog yang transparan dan efisien.



SPECIAL SECTION: INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM ASIA PACIFIC FORUM 2024

Kadin Indonesia Dorong Sinergi dan Teknologi dalam Pengembangan Transportasi melalui ITS Asia Pacific Forum 2024

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama dengan Intelligent Transport System Indonesia (ITS Indonesia) dan Kementerian Perhubungan RI menyelenggarakan kegiatan ITS Asia Pacific Forum 2024, yang merupakan acara global 2024.

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan berskala global yang telah diselenggarakan sejak tahun 1995. ITS Asia Pacific Forum berlangsung mulai 28 hingga 31 Mei 2024 di Jakarta Convention Center. Forum ini bertujuan sebagai platform tempat bertemunya para pelaku usaha di bidang transportasi dalam memamerkan inovasi teknologinya serta mendiskusikan kemajuan-kemajuan terbaru dalam sistem transportasi cerdas serta kerangka regulasi yang mendukungnya.

Turut hadir dalam rangkaian pembukaan kegiatan ini, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin dan Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid. Wapres RI secara spesifik menyoroti pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan transportasi modern. Beliau juga menyoroti pentingnya Indonesia di dalam peta transportasi di Asia Pasifik.

Diselenggarakan oleh Asosiasi ITS Indonesia, forum ini menjadi platform untuk mengeksplorasi teknologi mutakhir dan solusi inovatif yang mengubah sistem transportasi menjadi jaringan yang lebih cerdas, aman, dan berkelanjutan. Forum ini menjadi tempat bertemunya pembuat kebijakan, pemimpin industri, ahli, dan perwakilan masyarakat sipil untuk memajukan inisiatif transportasi berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.

(lanjutan di halaman 38)

Opening Ceremony
The 19th ITS Asia Pacific Forum
Transformation Towards A Safe
And Intelligent Urban Mobility

28th May 2024
Jakarta Convention Center





Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti lebih dari 1.000 delegasi dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, China, Jepang, Korea Selatan, New Zealand, Malaysia, dan Singapura, turut hadir. Organisasi internasional seperti UNESCAP, ASEAN, World Bank, Asian Development Bank, dan European Investment Bank juga berpartisipasi. Lebih dari 50 pembicara nasional dan internasional akan mengisi berbagai sesi diskusi dan pameran teknologi yang menampilkan inovasi terbaru dalam transportasi.



Kadin Indonesia Terus Mendorong Kolaborasi dan Inovasi di Sektor Transportasi

Sebagai bagian dari ITS Asia Pacific Forum 2024, Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan, Denon Prawiraatmadja, turut menjadi pembicara utama dalam sesi plenary dengan tema "Riding into the Future: Urban's Mobility New Frontiers." WKU Bidang Perhubungan menekankan bahwa pendekatan universal tidak dapat diterapkan dalam sektor transportasi. Sebab setiap kota memiliki karakteristik unik yang membutuhkan solusi khusus dan terarah. Oleh sebab itu, Kadin mendorong kolaborasi, inovasi, dan adaptasi dengan mengedepankan keberagaman daerah untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun regional.

WKU juga menggarisbawahi pentingnya adopsi inovasi teknologi canggih dan praktik terbaik (best practice) global dalam mendukung mobilitas perkotaan. Data Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa sektor transportasi saat ini memberikan kontribusi sekitar 5 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 dan 2023 juga mencatat bahwa sektor transportasi terus mengalami pertumbuhan tertinggi di kisaran 15%.



Dukung Percepatan Digitalisasi di Indonesia, Kadin dan Thales Gelar Innovation Day

Digitalisasi telah menjadi bagian dari kehidupan di Indonesia dan terus didorong pemanfaatannya dalam rangka mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. Roadmap Indonesia Emas 2045 yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia mengidentifikasi ekonomi digital sebagai bagian dari sumber pertumbuhan ekonomi baru dan digitalisasi sebagai enabler yang penting dalam memastikan pencapaian visi dan misi Indonesia Emas 2045.



Data terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menunjukkan bahwa, saat ini Indonesia memiliki lebih dari 221 juta pengguna internet dan 194,26 juta pengguna smartphone. Dengan lanskap demografis demikian, maka potensi pertumbuhan ekonomi digital dan inovasi sangat besar di Indonesia. Sebagai catatan, permintaan akan teknologi di Indonesia mencapai nilai 82 miliar dolar AS pada tahun 2023 dan diprediksi akan tumbuh menjadi 210-360 miliar dolar AS di tahun 2030.

Peningkatan adopsi teknologi digital di berbagai sektor dan pentingnya kontribusi serta semakin meningkatnya kontribusi dari sektor tersebut, diikuti dengan peningkatan resiko terhadap konsumen yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu resiko yang paling besar adalah keamanan siber dan masalah di dalam infrastruktur digital.

(lanjutan di halaman 39)



Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait dengan kebutuhan infrastruktur digital sekaligus keamanan siber di Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bekerja sama dengan Thales Group mengadakan “Innovation Day”, di Jakarta pada Rabu, 29 Mei 2024. Hasil dari kegiatan ini selain poin-poin masukan terhadap kerangka kebijakan sekaligus rencana pengembangan strategis transportasi digital di Indonesia adalah penandatanganan MoU antara Kadin Indonesia dan Thales. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi, Yukki Nugrahawan, juga turut hadir dalam sesi pembukaan. Dalam pidatonya, beliau memaparkan peran Kadin Indonesia dalam upaya kolaboratif dalam mengatasi tantangan infrastruktur dan percepatan ekosistem ekonomi digital di Indonesia.



Acara Innovation Day dihadiri lebih dari 200 peserta yang merupakan perwakilan sektor publik dan swasta. Turut memberikan sambutan adalah Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Edwin Manangsang, Perwakilan Duta Besar Perancis dan Pascale Sourisse, Thales Senior Executive Vice President International.



SPECIAL SECTION: SOLO GREAT SALE

Solo Great Sale: Mendorong UMKM dan Perekonomian Daerah

Solo Great Sale kembali hadir untuk ke-10 kalinya memeriahkan Kota Solo dengan memberikan dukungan besar bagi akses pasar UMKM lokal. Festival tahunan ini merupakan inisiatif penting yang didukung oleh Kadin Indonesia, pemerintah Kota Solo, dan para pemimpin bisnis daerah. Dalam sambutannya, Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin Indonesia, menyampaikan bahwa 97% perekonomian Indonesia didukung oleh UMKM. Oleh karena itu, Solo Great Sale diadakan dengan semangat untuk terus mendorong sektor UMKM daerah bahkan nasional.

Sejak peluncurannya pada tahun 2015, Solo Great Sale telah berhasil mendorong sektor pariwisata dan perdagangan di Kota Surakarta. Festival ini bukan hanya menjadi ajang belanja, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. Data menunjukkan bahwa nilai transaksi rata-rata Solo Great Sale selalu melampaui target. Pada tahun 2022, transaksi mencapai Rp 2,9 Triliun, sebuah prestasi luar biasa yang menunjukkan dampak positif acara ini terhadap perekonomian lokal.

Solo Great Sale tidak hanya memastikan roda perekonomian berputar optimal, tetapi juga menunjukkan komitmen Kadin Indonesia untuk mengembangkan dunia usaha dan peluang investasi daerah. Dengan kolaborasi antara pemerintah, Kadin, dan masyarakat, festival ini menjadi bukti nyata bagaimana kerjasama dapat menghasilkan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Mewakili Kadin Indonesia, Arsjad juga berharap Solo Great Sale dapat mendorong pengembangan potensi daerah, meningkatkan investasi dan terwujudnya aglomerasi, serta pertumbuhan dunia usaha dan UMKM di Kota Solo. Acara ini juga diharapkan dapat menginspirasi kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia untuk mengembangkan program pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah, tentunya dengan semangat gotong royong dan kolaboratif.

Kegiatan ini juga ikut dihadiri oleh Wakil Walikota Solo Teguh Prakosa, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia Yukki N. Hanafi, dan Ketua Kadin Kota Surakarta Ferry Septha Indrianto, serta berbagai pengurus Kadin Indonesia dan Kadin Kota Surakarta.





**Urgensi untuk melakukan
pengkinian data bagi pengurus
Kadin Indonesia**

Silakan cek **WhatsApp Hotline
(0895-6113-40500)** atau **Email** Bapak/Ibu
Pengurus, Segera Akses Link untuk Lakukan
Pengkinian Data

MANFAAT

Keanggotaan **Kadin**

Nikmati ragam keuntungan dan manfaat dengan menjadi bagian dari **keanggotaan Kadin Indonesia**



Update terhadap
Perkembangan Ekonomi
dan **Bisnis**



Dukungan dalam
Penerapan **Net Zero**



Dukungan **Advokasi**



Kemudahan **Pembuatan**
Surat Keterangan



Scaling up skill/
Kemampuan Wirausaha
dan Pekerja



Akses terhadap **Market**



Tumbuhkan Bisnis melalui
Network dan **Kolaborasi**



Dukungan terhadap
Transformasi Digital



Kesempatan **Promosi**



Potongan Harga Menarik
dari Mitra-Mitra Kadin



Terlibat dalam
Penyusunan Kebijakan
Industrial

CARA PENDAFTARAN Anggota Kadin



Scan QR Code atau
kunjugi **anggota.kadin.id**

1



Klik **"Daftar Anggota"**, lalu pilih jenis keanggotaan

2



Membuat akun dengan mendaftarkan **email** dan **NIK**

3



Menerima notifikasi pendaftaran akun dari **info.anggota@kadin.id**

4



Masuk dengan akun yang didaftarkan

5



Lengkapi formulir dengan data yang diperlukan

Persyaratan yang dibutuhkan:

- ✓ Email Penanggung Jawab
- ✓ NIB Perusahaan
- ✓ AKTA Perusahaan
- ✓ NPWP Perusahaan
- ✓ KTP Direksi
- ✓ Foto Pass Direksi
- ✓ No HP Penanggung Jawab

6



Menerima notifikasi dan unduh invoice pembayaran

7



Melakukan pembayaran ke rekening/ virtual account yang tertera di invoice

8



Menerima notifikasi keanggotaan terdaftar dari **info.anggota@kadin.id**

9



Download **KTA-B**, Anda telah resmi menjadi anggota Kadin

CARA MEMPERPANJANG KEANGGOTAAN KADIN

Hotline Keanggotaan
0813 8862 8081 | 0813 9830 2790



Kunjugi **anggota.kadin.id**



Masukan Email dan kata sandi, lalu klik **"Masuk"**



Klik menu **"KTA"**, lalu klik menu **"Perpanjang KTA"**



Menerima notifikasi perpanjangan keanggotaan dan invoice dari **info.anggota@kadin.id**



Melakukan pembayaran ke rekening/virtual account yang tertera di invoice



Menerima notifikasi keanggotaan terdaftar dari **info.anggota@kadin.id**



Download **KTA-B**, Anda telah memperpanjang keanggotaan Kadin

FITUR TERBARU

Website **Kadin.id**



Forum Anggota Kadin

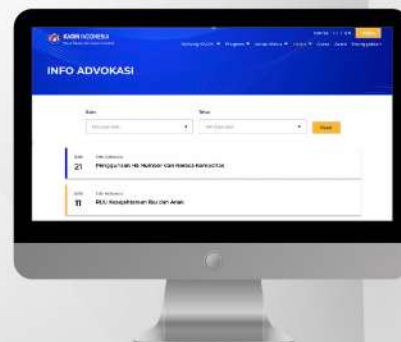
Dibuat sebagai tempat **berbagi informasi** seputar bisnis, *networking*, dan diskusi interaktif seputar perkembangan dunia usaha. Forum Anggota Kadin dikelola oleh Sekretariat Kadin Indonesia sebagai administrator.

Layanan Kadin



Halaman-halaman yang menonjolkan **layanan sekretariat** dan **manfaat keanggotaan**

Info Advokasi Kadin



Tempat untuk menghimpun informasi mengenai **perkembangan advokasi terkini** yang dilakukan oleh Kadin

OPINI

Aksesi Indonesia ke OECD Membuka Peluang Indonesia untuk Memajukan Iklim Ekonomi dan Investasi Tanah Air

Penulis: Thomas Noto Suoneto - Head of Global Strategy and Economic Diplomacy Kadin Indonesia

Kadin Indonesia selaku perwakilan dunia usaha Indonesia menyambut dan mendukung keputusan Indonesia untuk bergabung ke OECD. Aksesi Indonesia ke OECD menjadi langkah yang tepat bagi Indonesia untuk melaksanakan reformasi dan perbaikan kebijakan guna memperbaiki iklim investasi dan ekonomi dalam negeri, dan mendorong potensi pertumbuhan ekonomi tanah air.

Proses bergabungnya Indonesia ke OECD, tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah dan dunia usaha. Hal ini penting guna memastikan proses reformasi dan perbaikan kebijakan dapat berlangsung secara inklusif dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Bergabungnya Indonesia ke OECD juga turut memberi peluang bagi Indonesia untuk melakukan benchmarking dengan negara-negara yang lebih maju, dan hal ini akan menjadi modalitas yang baik bagi Indonesia.

Saat ini Kadin sedang mempelajari bagaimana keanggotaan dalam OECD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan perdagangan dan investasi di tanah air. Hal ini nantinya akan menjadi pedoman yang penting bagi Kadin Indonesia untuk mengkaji dampak positif keanggotaan OECD terhadap perekonomian dalam negeri. Peningkatan standar dan kebijakan tentunya, diharapkan dapat menjadi komponen positif dalam mendorong kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara lainnya.

Pertumbuhan pendapatan per kapita di Indonesia membutuhkan peningkatan produktivitas yang didorong oleh investasi yang bersifat capital-labor intensive. Implementasi yang efektif dalam proses bergabungnya Indonesia ke OECD dapat menjadi salah satu pendorong untuk mencapai visi peningkatan lapangan pekerjaan dan nilai tambah usaha yang lebih besar.

Indonesia kini sedang berada dalam tahap legal review, dan pemerintah Indonesia kini sedang membandingkan dan mengkaji instrumen kebijakan yang menjadi fokus area dari OECD. Dalam rangka ini, Kadin Indonesia selaku perwakilan dunia usaha di Indonesia siap mendukung proses ini dan telah membentuk gugus tugas untuk mengidentifikasi dan memberikan masukan konkrit terkait praktik-praktik terbaik dari OECD yang perlu didorong oleh Indonesia dan memonitor agar reformasi kebijakan ini tidak berdampak negatif bagi dunia usaha Indonesia. Keterlibatan dunia usaha di Indonesia menjadi penting, karena 26 sektor yang menjadi fokus OECD, seperti pertanian, perdagangan, investasi, UMKM, perikanan, kebijakan ekspor dan lainnya, merupakan sektor-sektor yang strategis dan melibatkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan.

Kadin Indonesia juga sedang menjajaki kerjasama dengan berbagai pihak untuk memahami peran sektor bisnis di negara seperti Korea Selatan, Chili, dan Kosta Rika dalam mendukung proses keanggotaan negara tersebut di OECD serta dampak positif yang dirasakan setelahnya.

Sekali lagi, proses ini juga perlu memperhatikan aspirasi pengusaha daerah, sebagai salah satu pelaku utama dalam reformasi kebijakan Indonesia. Kadin Indonesia menyambut baik adanya komite 'regional development policy' dalam Peta Jalan OECD untuk Indonesia, yang mana hal tersebut tentunya akan berkaitan langsung dengan pembangunan daerah.

KABAR TERKINI

Program Simpanan Wajib Tapera Sebesar 3%

Sumber: Hukumonline.com

Presiden Jokowi baru-baru ini menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024 ("Perubahan"), yang mengubah Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 ("PP 25/2020") tentang Penyelenggaraan Simpanan Perumahan Rakyat ("Tapera") dan yang telah berlaku sejak 20 Mei 2024. Berbagai ketentuan yang secara khusus berkaitan dengan peserta Tapera dan yang semula diatur dalam kerangka PP 25/2020 sebelumnya telah dianalisis dalam Indonesian Legal Brief edisi berikut: "Peraturan Pelaksana Program Tapera Akhirnya Diterbitkan". Di antara hal-hal lainnya, PP 25/2020 menyatakan bahwa simpanan wajib di bawah program Tapera ditetapkan sebesar 3% dari gaji pekerja atau penghasilan pekerja mandiri.^[1] Selain itu, PP 25/2020 juga menyatakan bahwa peserta Tapera haruslah pekerja atau pekerja mandiri yang berusia minimal 20 tahun atau, jika berusia di bawah 20 tahun, sudah menikah pada saat mendaftar sebagai peserta program. Peserta mencakup sektor-sektor berikut: 1) Calon Pegawai Negeri Sipil; 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara; 3) Prajurit Tentara Nasional Indonesia; 4) Prajurit Siswa Tentara Nasional Indonesia; 5) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6) Pejabat Negara; 7) Pekerja/buruh pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah; 8) Pekerja/buruh pada Badan Usaha Milik Desa; 9) Pekerja/buruh pada Badan Usaha Swasta; dan 10) Pekerja penerima gaji/upah lainnya ("Jenis Pekerja Lainnya").^[2] Namun, penting dicatat bahwa PP 25/2020 telah mengamanatkan bahwa pemberi kerja di perusahaan swasta wajib mendaftarkan pekerja mereka ke BP Tapera hingga 2027 (tujuh tahun setelah tanggal diundangkannya PP 25/2020).^[3]

Berbagai macam perubahan kini telah diperkenalkan dalam Perubahan tersebut. Pada intinya, sebanyak enam pasal telah direvisi dan satu pasal ditambahkan dalam Perubahan yang mengatur berbagai hal yang mencakup penambahan definisi, ketentuan-ketentuan tertentu mengenai dasar perhitungan simpanan pekerja dan juga penunjukan bank kustodian oleh Badan Pengelola Tapera ("BP Tapera"), dan sebagainya. Untuk memberikan pemahaman umum mengenai kerangka baru ini, this Indonesian Legal Brief edisi kali ini menyoroti ketentuan-ketentuan baru yang telah diperkenalkan dalam Perubahan. Analisis kami dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Dasar Penghitungan Simpanan Pekerja;
2. Penunjukan Bank Kustodian;
3. Pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

Dasar Penghitungan Simpanan Pekerja

Perubahan ini tidak membuat perubahan dalam hal jumlah simpanan, namun, Perubahan ini telah menyesuaikan faktor perkalian dasar perhitungan yang terkait dengan jumlah simpanan peserta. Perhitungan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu, seperti yang dirangkum di bawah ini:^[4]

(lanjutan di halaman 48)

[1] Pasal 15 (1), PP 25/2020 dan Perubahan.

[2] Pasal 5 dan 7, PP 25/2020, dan Perubahan.

[3] Pasal 71 dan 68, PP 25/2020.

[4] Bandingkan Pasal 15 (4), Perubahan dengan PP 25/2020.

Perubahan		PP 25/2020	
Jenis Pekerja	Ditetapkan Oleh...	Jenis Pekerja	Ditetapkan Oleh...
Pekerja yang menerima gaji/upah bersumber dari APBN/APBD	Menteri Keuangan ("Menkeu") berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ("Menpan")	Sama dengan pihak yang ditetapkan dalam Perubahan	
Pekerja yang bekerja di BUMN/BUMD/BUMDes atau badan usaha swasta	Menteri Ketenagakerjaan ("Menaker")	Pekerja yang bekerja di BUMN	Menteri BUMN
Jenis pekerja lainnya	Menaker	Sama dengan pihak yang ditetapkan dalam Perubahan	
Pekerja mandiri	BP Tapera	Tidak tersedia	
-		Pekerja yang bekerja di BUMD	Pemerintah daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri
-		Pekerja yang bekerja di BUMDes	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
-		Pekerja yang bekerja di badan usaha swasta	Menaker

Selain itu, Perubahan tersebut juga memperjelas bahwa dasar perhitungan untuk penentuan faktor pengali jumlah tabungan bagi peserta pekerja mandiri akan dihitung berdasarkan penghasilan yang dilaporkan dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan BP Tapera yang akan datang.^[5]

Penunjukan Bank Kustodian

Sebagai informasi tambahan, BP Tapera akan menunjuk manajer investasi dan bank kustodian dalam waktu tiga bulan setelah BP Tapera mulai beroperasi. Perubahan tersebut telah merevisi beberapa ketentuan yang secara khusus terkait dengan penunjukan bank kustodian, seperti yang dirangkum dalam tabel di bawah ini:^[6]

(lanjutan di halaman 49)

^[5] Pasal 5a dan 7, Perubahan.
^[6] Bandingkan Pasal 31 dan 52, Perubahan dengan PP 25/2020.

Perihal	Perubahan	PP 25/2020
Penunjukan bank kustodian	Satu bank umum yang melaksanakan prinsip konvensional dan satu bank umum yang melaksanakan prinsip syariah	Satu bank kustodian
Penunjukan bank umum syariah	Ditunjuk sesuai dengan kemampuan bank umum yang menerapkan prinsip syariah sebagai bank kustodian. Apabila penunjukan tersebut tidak dapat dilakukan, maka BP Tapera dapat menunjuk bank umum yang beroperasi sesuai dengan prinsip konvensional namun telah mendapatkan sertifikasi syariah dari lembaga yang berwenang.	Tidak tersedia
Pelaporan wajib	Laporan wajib yang disampaikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan dan yang membahas pelaksanaan penyaluran pembiayaan perumahan kepada BP Tapera dan bank kustodian harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Berbagai bentuk pelaporan diatur dalam berbagai Peraturan BP Tapera

Pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

Penyesuaian yang telah dilakukan terkait hal ini dirangkum dalam tabel di bawah ini:^[7]

Perihal	Perubahan	PP 25/2020
Dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (bersama-sama disebut sebagai "Dana") yang dikelola	BP Tapera akan bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh Dana yang dialihkan oleh Menkeu kepada BP Tapera. Dana tersebut terdiri dari investasi pemerintah yang dikelola secara terpisah dari dana Tapera.	Dana Tapera yang berasal dari Dana yang terdiri dari tabungan pemerintah di BP Tapera.

(lanjutan di halaman 50)

[7] Bandingkan Pasal 64, Perubahan dengan PP 25/2020.

Perihal	Perubahan	PP 25/2020
Pengelolaan Dana	BP Tapera akan terlibat dalam pengelolaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang investasi pemerintah.	Tidak tersedia
Penarikan Dana	Dana dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Dana dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemerintah.
Penghentian Dana	Dana dapat dihentikan ketika BP Tapera telah beroperasi penuh.	Tidak tersedia

Poin Utama

Dikarenakan PP 25/2020 telah mengatur berbagai ketentuan dalam hal kepesertaan Tapera, seperti persyaratan simpanan 3% dan jenis serta bentuk pekerja yang termasuk dalam kriteria peserta, maka para pemberi kerja dari perusahaan swasta saat ini harus bersiap-siap untuk mendaftarkan pekerja mereka ke BP Tapera, yang harus dilakukan paling lambat sebelum 2027.



Sekilas Tentang Kadin for Naker

Kadin for Naker hadir dalam bentuk **platform digital** untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang dapat diakses oleh seluruh tenaga kerja di Indonesia dari berbagai sektor dan industri sekaligus menjadi platform link & match antara tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Kadin for Naker merupakan **program pengembangan kapasitas** inisiatif Kadin Indonesia bersama dengan Serikat Buruh di Indonesia dan didukung oleh Pijar Foundation.

Manfaat Kadin for Naker untuk Pekerja

-  Materi pembelajaran yang dapat diakses **kapan saja**
-  Materi yang disesuaikan dengan **kebutuhan industri**
-  Lowongan kerja dari perusahaan yang **terverifikasi**

Manfaat Kadin for Naker untuk Perusahaan

-  Sarana **peningkatan kualitas SDM** bagi perusahaan
-  **Keterampilan pekerja** yang terverifikasi
-  Peningkatan kapasitas pekerja untuk kinerja yang **lebih optimal**
-  Pencarian tenaga kerja berdasarkan **kompetensi** yang dicari

Kategori Kelas di Kadin for Naker

Mencari Pekerjaan

Pengembangan Diri

Mencari Pendapatan Tambahan

Program Komputer

Bahasa

Keterampilan Industri Spesifik

Tata Cara Mendaftar Kadin for Naker



WIKI WIRAUSAHA

Platform digital yang berfungsi sebagai wadah bagi UMKM, Perusahaan, Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung UMKM Indonesia untuk naik kelas

Akses pasar

Akses keuangan

Pelatihan

Kemitraan inklusif

Direktori UMKM



Banyak sekali ilmu dan skill yang saya dapatkan setelah mengikuti program ini. Materinya mudah untuk dipahami, sehingga ilmunya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari bahkan di bisnis yang saya geluti selama ini.

Achmad Muzamil

Pengusaha asal Wonosobo

Mari bergabung dan tampilkan profil perusahaan anda agar terhubung dengan berbagai calon Mitra Perusahaan atau UMKM lainnya.



wikiwirausaha.id

Daftar ke:

wikiwirausaha@kadin.id

Menara Kadin Indonesia Lt.29
Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950

“Menuju Ekosistem Bisnis yang Berkelanjutan”

NZH adalah sebuah inisiatif dari dunia usaha untuk mencapai *Net Zero Emission* di Indonesia. Bersama Kadin, mari wujudkan komitmen perusahaan anda menuju *Net Zero*, melalui:

Science Based Emission

Emission Reduction

Climate Mitigation

Climate Adaptation

Daftar sekarang juga ke

secretariat@netzerohub.id

Menara Kadin Indonesia Lt.29
Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950



Netzerohub.id

EKSPOR BARANG ANDA KE SELURUH DUNIA MELALUI TRADE

TRADE adalah platform Sentra Layanan Dokumen Elektronik KADIN Indonesia yang membantu pembuatan dokumen ekspor seperti *COO*, *Certificate of Export Goods*, *Certificate of Free Sale*, serta legalisir dokumen ekspor dengan mudah dan cepat.

Tahapan-tahapan untuk membuat dokumen ekspor:



Klik **Masuk** atau **Daftar** untuk masuk maupun mendaftar akun.

Masukkan alamat email dan password. Jika belum memiliki akun, dapat mendaftar terlebih dahulu dengan klik **Daftar**.



Pilih **Document Registration** untuk melengkapi data-data mengenai perusahaan.



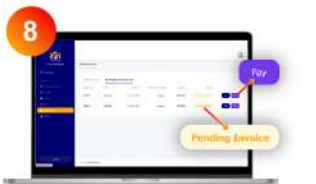
Lengkapi data-data dan unggah dokumennya, lalu klik **Save Changes**.



Pilih **Create COO** lalu pilih form yang sesuai kebutuhan dengan klik **Create**



Isi form dengan melengkapi data Itinerary dan Goods Item dan unggah dokumennya.



Setelah selesai mengisi form, tunggu beberapa saat hingga status berubah dari **Waiting for Approval** menjadi **Waiting for Payment**. Lalu buka menu **Transaction**, pilih **Pending Transaction**, lalu klik **Pay**. Kemudian lakukan pembayarannya menggunakan **virtual account** yang tertera.



Setelah pembayaran dilunaskan, COO **Siap Dicetak** dan digunakan.

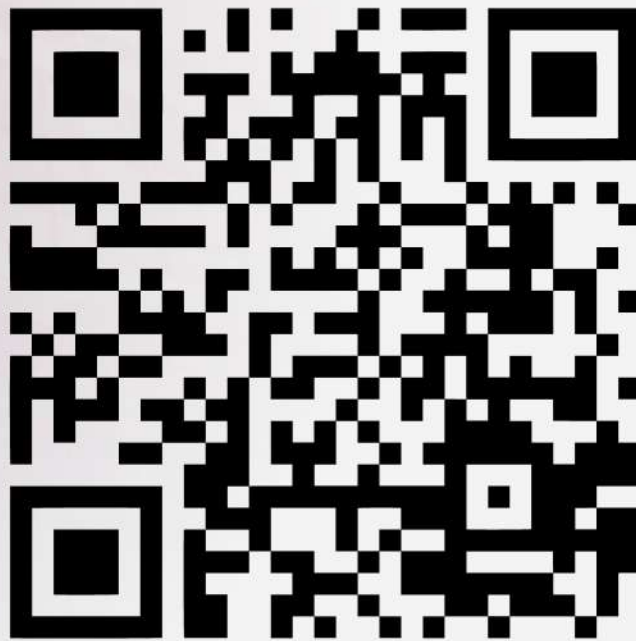
Untuk informasi lebih lanjut,
hubungi Help desk:

☎ +62 882-1975-0620 (LEO) ☎ +62 882-9208-4913 (ALDI)





Mari menjadi bagian dari **ekosistem bisnis Indonesia** dengan bergabung Kadin Indonesia



tinyurl.com/pendaftarananggotakadin



Program-Program Kadin Indonesia Telah
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Jadilah Bagian Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sebagai Sponsor Kadin Indonesia



Kegiatan Utama Kadin Indonesia 2024



Hari Ulang Tahun
Republik Indonesia
17 Agustus



Hari Ulang Tahun
Kadin Indonesia
24 September



Rapimnas
Kadin Indonesia
Q4 2024



Kadin Impact Award
Sepanjang Tahun
2024



Quarterly Regulatory
Outlook 2024



Quarterly Policy
Outlook 2024

Informasi lanjutan tentang kerja sama dan
kolaborasi dapat menghubungi

Andri (+62 8560 306 7593)

Terbangkan Potensi Ekonomi Bersama, Mencapai Visi Indonesia Emas 2045!



Kadin Indonesia dan Garuda Indonesia berkolaborasi untuk memberikan **kemudahan** dan **kenyamanan** bagi seluruh anggota Kadin Indonesia, dalam melakukan **perjalanan udara** di dalam maupun luar negeri

Manfaat yang dapat diperoleh Anggota Kadin Indonesia

POTONGAN HARGA

UP TO **20%**

Rute Internasional

POTONGAN HARGA

3%

Rute Domestik

POTONGAN HARGA

UP TO **20%**

Rute Middle East

POTONGAN HARGA

UP TO **20%**

Rute Interline

Kemudahan lain yang dapat dimiliki Anggota Kadin Indonesia



Memiliki ekstra bagasi
hingga **5 kilogram**



Mendapatkan kemudahan
program MICE jika bepergian
dalam kapasitas 100 orang



Memiliki **akses check-in**
pada **counter khusus**



Mendapatkan **staf sales khusus**



Segera daftarkan dirimu menjadi
Anggota Kadin Indonesia dan nikmati
manfaat untuk melakukan perjalanan bersama

Garuda Indonesia

Nikmati Benefit Eksklusif sebagai Anggota Kadin Indonesia bersama Hyundai!

Optimalkan mobilitas bisnis Anda dengan **potongan** harga istimewa dari Kadin Indonesia x Hyundai hingga **50 juta rupiah***



IONIQ 5



IONIQ 6

Mobil Listrik



Santa Fe



Stargazer



Creta



Palisade



Staria

Mobil Non-Listrik

Tata cara pembelian:

1. Hubungi nomor Kadin Indonesia yang tertera untuk melakukan verifikasi anggota aktif Kadin Indonesia yang telah memiliki KTA-B
2. Setelah melakukan verifikasi, pihak Hyundai Indonesia akan segera menghubungi Anda untuk melanjutkan proses transaksi

* Potongan harga berbeda-beda untuk masing-masing jenis mobil

Informasi lebih lanjut hubungi:

+62 813-8801-2200
(Kadin Indonesia)



KADIN INDONESIA



Informasi lanjutan terkait **pasar internasional** dapat ditemukan di sini:

bsd-kadin.id

WIKI WIRUSAHA



Temukan informasi menarik bagi **pengembangan bisnis UMKM** di sini:

Wikiwirusaha.id



Temukan layanan **pengurusan dokumen dagang** di sini:

trade.kadin.id



Ikut bergabung dalam ekosistem **bisnis berkelanjutan** di sini:

Netzerohub.id



Kembangkan **kapasitas** dan kesempatan meningkatkan **jenjang karir** di sini:

kadinfornaker.id

Disusun oleh
Humas Sekretariat Kadin Indonesia

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 | Telp. 021-5274484



kadin.indonesia.official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



www.kadin.id